

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PADA KELURAHAN PARANGLOE KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

HASRIANI

45 15 021 010



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang tersebut dibawah ini :

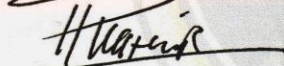
Nama : **Hasriani**
Nomor Stambuk : **45 15 021 010**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul : **IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA
KELURAHAN PARANGLOE KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 3 September 2019

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Natsir Tompo, M.Si

Pembimbing II



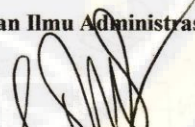
Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si

Diketahui Oleh

Dekan Fkip Universitas Bosowa Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A



Nining Haslinda Zamal, S.Sos., M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Jumat, Tanggal Dua Belas Juli Dua Ribu Sembilan Belas, Dengan Judul Skripsi **IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA KELURAHAN PARANGLOE KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

Nama : **Hasriani**

Nomor Stambuk : **45 15 021 010**

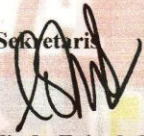
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

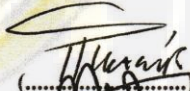

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A


Sekretaris

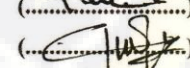

Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si


Tim Penguji Skripsi

1. **Drs. Natsir Tompo, M.Si**
2. **Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si**
3. **Dr. Hj. Juharni, M.Si**
4. **Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

MOTTO

- Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” (Q.S Al-Insyirah 6-7)
- Saya datang, Saya bimbingan, Saya Revisi, Saya Ujian dan Saya Menang

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada :

- Kedua orang tua tercinta, bapak dan ibu yang selalu menghadirkan doa yang tulus dan cinta kasih serta motivasi yang tak henti-hentinya baik moral maupun spiritual.
- Almamater yang telah memberikan ruangan tempat menimba ilmu.

KATA PENGANTAR



Tiada kata dan ucapan yang mulia dan pantas diucapkan untuk mengawali kata pengantar ini, kecuali Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1, pada Universitas Bosowa Makassar.

Sholawat dan taslim tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Muhammad SAW, Nabi yang telah membebaskan umatnya dari belenggu kejahiliyaan menuju tingkat intelektual dan kecerdasan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta (Salim), dan Ibunda tersayang (Hj. Nursiah) yang telah membesarkan, mendidik, mengasihi, memberi dukungan serta pengorbanan yang tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sebagai Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan arahan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Pallu, ST. M.Eng**, Rektor Universitas Bosowa Makassar

2. Bapak **Arief Wicaksono., S.Ip, MA,** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
3. Ibu **Nining Haslinda Zainal, S. Sos., M.Si,** Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak **Drs. Natsir Tompo., M.Si,** Selaku pembimbing I yang selalu mendukung, membantu dan sabar memberi masukan selama proses bimbingan hingga skripsi ini selesai
5. Ibu **Nining Haslinda Zainal., S.Sos, M.si,** selaku pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis, memberikan ide, arahan dan bijaksana menyikapi keterbatasan pengetahuan penulis, serta ilmu dan pengetahuan yang berharga (Terima kasih banyak Bu)
6. Ibu **Dr. Hj. Juharni, M.Si,** dan Ibu **Dr. Nurkaidah, M.M** selaku penguji penulis, terima kasih atas saran-saran dan kritik yang sangat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini
7. **Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar** yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan

8. Para Staff Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (**Pak Budi, Ibu Rahma, Ibu Yuli dan Ibu Mega**) yang telah memberikan bantuan dan layanan kepada penulis selama perkuliahan hingga selesai
9. **Kepala Desa Kelurahan Bonto Daeng dan Jajarannya beserta Masyarakatnya** yang sudah saya anggap seperti keluarga, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menerima dengan baik dan terimakasih juga atas bantuan dan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis
10. Buat **Para Aparat Kelurahan Parangloe beserta Para Masyarakat** yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini selesai tepat waktu
11. Untuk **Teman-teman Seperjuangan Administrasi Negara** yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, serta mau berbagi dalam suka maupun duka
12. Untuk **Para Saudaraku PET15I**, Salam Cinta dan Salam Sayang. Sukses selalu untuk kita semua.
13. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar **“BEM SOSPOL”** dan **“HIMAN”** terima kasih atas kerjasamanya dan terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Salam Biru Kuning☺
14. Teman-teman **KKN Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, Zaenal H.M, Taqwa Hasanuddin, Dzulfadli, Sulkifli Burhanuddin, Yusuf, Harvianus Bongon, Wawan Darmawan, Alfyna Anggara Hanafi, Intan Kusuma Riani, Hermiliana P. Saiman, Putu Ayu Anggraeni, Mikah Sumalu, Emanuella Trisha Omega,**

Terimakasih untuk kebersamaannya selama kurang lebih 2 bulan dan untuk pelajaran berharganya

15. Sahabat-sahabatku, **Maharani Rachman, Isna Tenriana, Irwani, Muh.**

Angsar Bugis, *Thank you so much guys..*

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan dari semua pihak bernilai ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
Aamiin

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan berharga bagi karya penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan turut memberikan kontribusi dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Makassar, 2 September 2018

PENULIS

ABSTRAK

Hasriani (4515021010), **IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA KELURAHAN
PARANGLOE KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR,**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara,

Universitas Bosowa Makassar. Oleh : 1. Drs. Natsir Tompo, M.Si 2. Nining

Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si

Good Governance di Indonesia, dapat didefinisikan sebagai praktek penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan kemampuan mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data diterapkan melalui empat alur penerapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Informan yang dilibatkan terdiri dari berbagai latar belakang jabatan dan lembaga.

Hasil penelitian dengan focus 1) Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe : (a) Pelaksanaan prinsip transparansi dengan indikator (i) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban (ii) Keterbukaan informasi tentang dana (keuangan) (iii) Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat. (b) Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan indikator (i) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah kelurahan (ii)

Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe : (a) Faktor yang mempengaruhi transparansi dengan indikator (i) komunikasi (ii) sumber daya. (b) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dengan indikator (i) keterbukaan dan kejelasan (ii) pemimpin teladan (iii) kemampuan penyusaian.

Kata Kunci : Implementasi Good Governance, Tranparansi, Akuntabilitas



ABSTRACT

Hasriani (4515021010), **IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE ADMINISTRATION OF GOVERNMENT IN THE VILLAGE OF PARANGLOE, TAMALANREA, MAKASSAR CITY**, Faculty Of Social And Political Sciences, Department Of State Administration Of Bosowa University Makassar. By : 1. Drs. Natsir Tompo, M.Si 2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si

Good governance in Indonesia, can be defined as the practice of implementing democratic governance with the ability to manage various social and economic resources well for the benefit of the people of Indonesia based on the principle of deliberation and consensus.

By providing opportunities for the wider community to find out various information regarding the administration of government, it can facilitate community efforts in assessing the government's alignments with the public interest. The public can easily determine whether to provide support to the government, or vice versa, criticism and protests carried out so that the government is more in favor of the public interest. Transparency also has a relationship with public accountability. To create good governance, one of which is demonstrated by an accountable government bureaucratic service system, awareness among government employees regarding the importance of changing the image of public services is very necessary.

This type of research is descriptive qualitative research. The technique of data collection is done in several ways, namely interviews, observation and documentation. The data sources used are of two types, namely primary data and secondary data. Data analysis techniques are applied through four application paths, namely data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing and data verification. The informants involved consisted of various office backgrounds and institutions.

Focused research results 1) Implementation of the principles of transparency and accountability in the Parangloe village: (a) Implementation of the principle of transparency with indicators (i) Provision of clear information on procedures for implementation and accountability (ii) Information disclosure about funds (finance) (iii) Implementation of activities involving the community. (b) Implementation of accountability principles with indicators (i) Increased public trust and satisfaction with financial management by the kelurahan government (ii) The emergence of public awareness about the right to assess

governance in the kelurahan. 2) Factors that influence the implementation of the principles of transparency and accountability in the Parangloe village: (a) Factors that affect transparency with indicators (i) communication (ii) resources. (b) Factors that affect accountability with indicators (i) openness and clarity (ii) exemplary leaders (iii) disclosure capabilities.

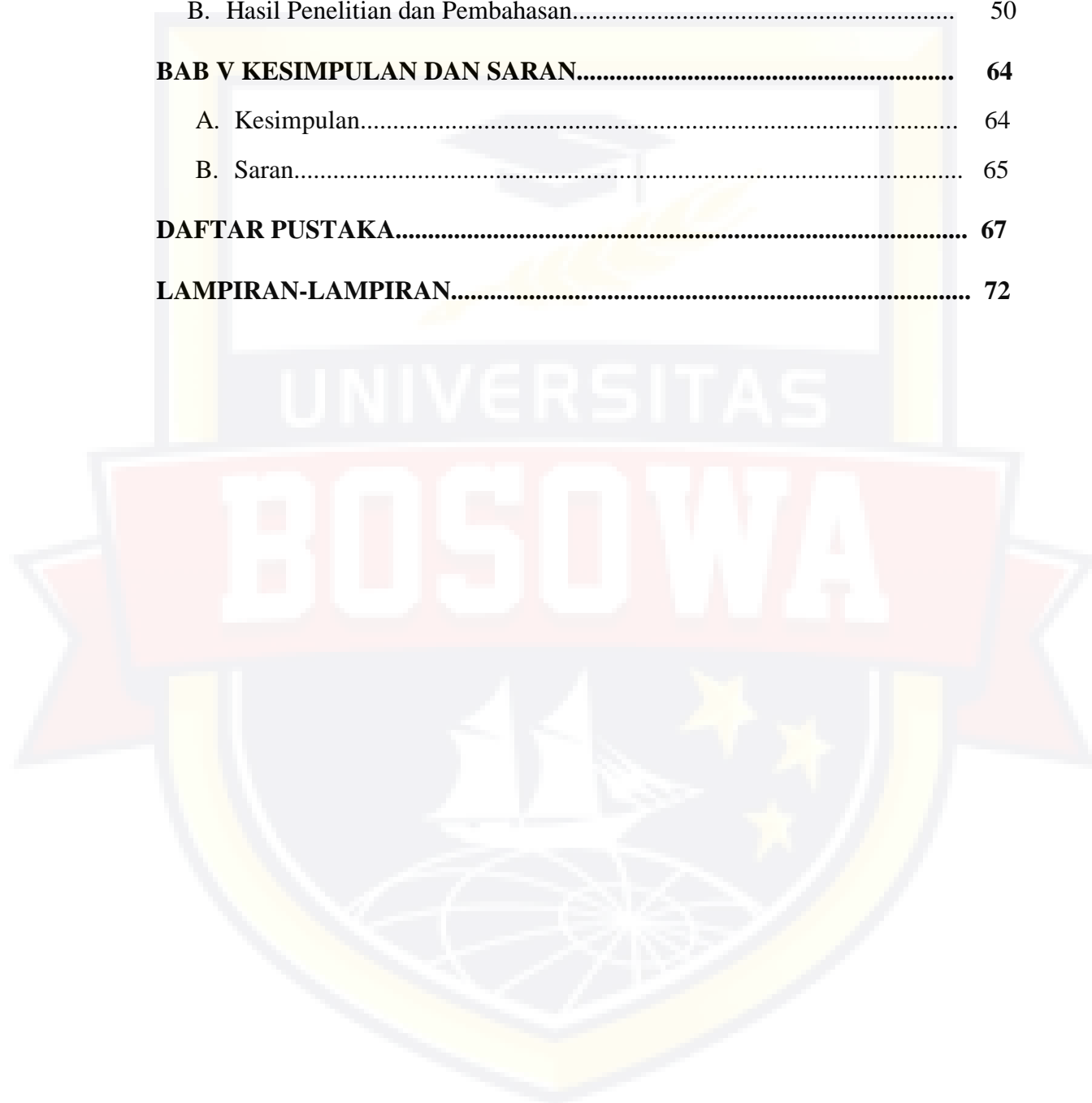
Keywords: Implementation of Good Governance, Transparency, Accountability



DAFTAR ISI

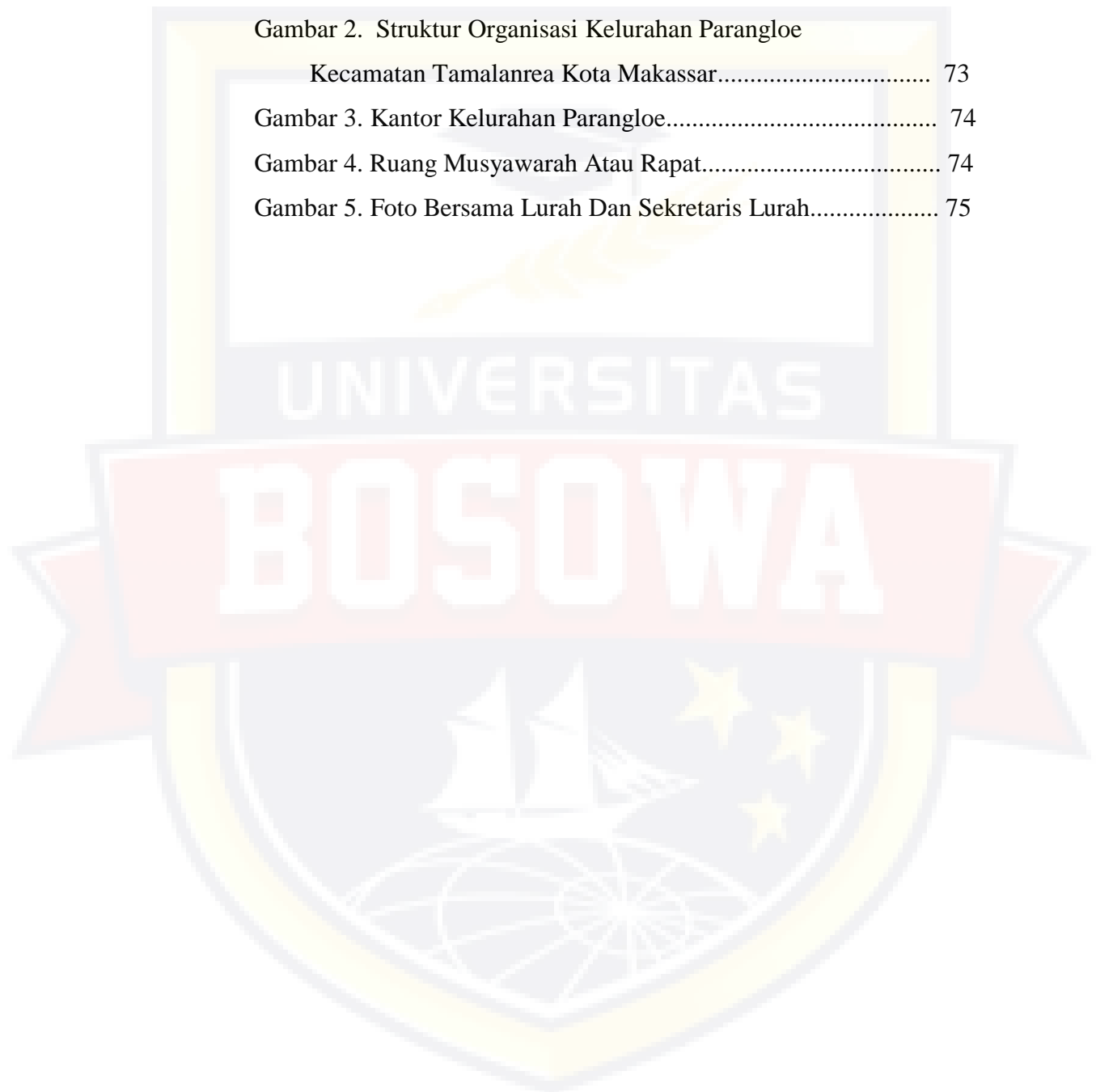
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian.....	8
1. Implementasi.....	8
a. Konsep Implementasi.....	9
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	10
2. Good Governance.....	13
a. Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli	14
b. Konsep Good Governance	16
c. Prinsip-Prinsip Good Governance.....	17
3. Pelayanan Publik.....	26
4. Pemerintahan.....	31
5. Kelurahan	33
6. Penelitian Terdahulu.....	36
7. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe dan Data Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.....	47
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep.....	40
Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.....	73
Gambar 3. Kantor Kelurahan Parangloe.....	74
Gambar 4. Ruang Musyawarah Atau Rapat.....	74
Gambar 5. Foto Bersama Lurah Dan Sekretaris Lurah.....	75



BAB I`

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh Undang-undang.

Pencanangan otonomi daerah tentu tidak demikian saja memenuhi keinginan daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah, yaitu DPRD, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk berkerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah yang sejak awal tahun 2001, memang bisa dilihat sebagai bagian dari suatu proses perubahan. Akan tetapi bila proses perubahan tersebut ditumpukan hanya pada kebijakan otonomi daerah, khususnya yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan UU No. 12

Tahun 2008, maka demokrasi tidak akan pernah terwujud. Setiap kebijakan elit politik, masih sangat mungkin menyisakan kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan demokrasi dan keadilan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberikan dampak yang positif dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah yang merupakan sarana untuk memampukan masyarakat daerah untuk dapat mengoptimalkan kemampuan diri dalam mensejahterakan kehidupan mereka. Ide desentralisasi muncul sebagai dampak adanya tuntutan masyarakat akan perlunya percepatan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi terwujudnya konsep negara kesejahteraan (*welfarestaat*) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke -IV, yaitu:

“.... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *United Nations Development Programme* selanjutnya disingkat (UNDP), mendefinisikan pemerintahan (*Governance*) sebagai pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif

untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Pentingnya partisipasi masyarakat juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kuleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Good Governance di Indonesia, dapat didefinisikan sebagai praktek penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan kemampuan mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

Good Governance juga mempunyai arti pandangan dari sebuah kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*Civil Society*), dan sector swasta. *Good Governance* adalah *policy stakeholders* forum artinya kelompok-kelompok masyarakat yang dilibatkan adalah perwakilan elemen-elemen yang terpengaruh oleh kebijakan publik yang sedang proses. Kesepakatan itu mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga

(elemen-elemen) dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya.

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Seorang administrator publik harus mampu mengembangkan sikap-sikap yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap rakyat. Rakyatlah yang akan menilai seberapa jauh para pejabat

publik itu mampu menghasilkan suatu pekerjaan yang selalu ditunjukkan dengan akuntabilitas yang tinggi. Ketika para pejabat publik tidak mampu mempertanggungjawabkannya berdasarkan asas transparansi, maka seringkali rakyat mengeluh dan cenderung menyatakan bahwa seorang pejabat itu tidak mampu bertindak sesuai dengan amanah mereka. Rakyat hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mampu merealisasikan kepentingan para pejabat publik.

Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan publik yang langsung bersinggungan dengan masyarakat diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance antara lain akuntabilitas dan transparansi. Kelurahan sebagai tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan, harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dari pengamatan sementara di lapangan, sering dijumpai adanya berbagai keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh para aparatur pemerintah di Kelurahan. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Parangloe. Berdasarkan hasil pengamatan, kurangnya keramahan pegawai dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi dan kurangnya pengetahuan aparat menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik. Selain itu pengurusan surat-surat seperti pengurusan berkas pembuatan E-KTP, Akte-akte, Berkas Kartu Keluarga serta keterangan penghasilan yang seharusnya tidak banyak bahkan gratis serta selesai dalam beberapa jam, tidak terlaksana dengan baik. Pegawai Kelurahan terkadang mengutip dana dari masyarakat dalam hal pengurusan tersebut agar cepat siap. Kurangnya pertanggungjawaban yang jelas dan kurangnya transparansi dalam hal biaya

administrasi sangat dikeluhkan masyarakat. Masyarakat juga mengeluhkan prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, kurang informatif, kurang akomodatif, dan terbatasnya fasilitas, sarana, dan prasarana sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya), serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan dan KKN. Kelurahan Parangloe juga tidak pernah menginformasikan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban atas kinerja mereka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi program kerja kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Transparansi dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pemberian informasi juga sangat terbatas. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kurang simpati dan kurang percaya atas kinerja para pegawai kelurahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara di daerah pada khususnya.
- b. Menjadi masukan bagi pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang disebut dengan *good governance*.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Implementasi

a. Konsep Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

“Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan” (Randal Ripley, 2012:15).

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa:

“tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat”. (2011:1)

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti yang berpendapat tentang konsep implementasi yang tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli sebelumnya, dalam bukunya menyatakan bahwa:

“implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran kebijakan”. (2010:21)

Menurut pandangan Agustino tentang implementasi, menyatakan bahwa:

“implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. (2010:139).

Sedangkan menurut Ripley Randal dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa:

“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”. (2012:148)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. (2013:139)

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factories to policy implementation they are: "communication, resources, disposition, and bureaucratic structure"* (2010:154).

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik

institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. (2012:21)

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa:

“tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”. (2010: 179)

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus

pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-down*.

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2010), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada

mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b.* Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisasi secara drastis.

2. Good Governance

Good Governance adalah tata laksana pemerintahan yang baik. Secara sederhana definisi dan pengertian good governance adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Pengertian good governance ini sangat beragam dan para ahli pun berbeda dalam merumuskan definisi good governance ini. Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah to rule with authority atau dalam bahasa Indonesia yang artinya memerintah dengan kewenangan.

a. Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli

Nah, dari banyaknya versi dari definisi dan pengertian good governance. Di kesempatan ini akan diulas tentang pengertian good governance menurut para ahli secara lengkap. Berikut penjelasannya :

1. Pengertian Good Governance Menurut World Bank (Bank Dunia)

Good Governance menurut pengertian World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2. Pengertian Good Governance Menurut LAN dan BPKP

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan Public goods dan services. Good Governance yang efektif menuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar pemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat.

3. Pengertian Good Governance Menurut UNDP

Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif

diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien bertanggungjawab serta visi strategik.

4. Pengertian Good Governance Menurut Bintoro Tjokroamidjojo

Bintoro Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change (agen perubahan) dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang.

5. Pengertian Good Governance Menurut Kashi Nisjar

Kashi Nisjar (2011) dalam Domai (2013) mengemukakan bahwa secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum.

6. Pengertian Good Governance Menurut Kooiman

Kooiman (2013) berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

7. Pengertian Good Governance Menurut J.B.Kristiadi

J.B.Kristiadi berpendapat bahwa Good Governance dicapai melalui pengaturan yang tepat diantara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi

termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi-transaksi dengan biaya rendah.

b. Konsep Good Governance

Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya “good governance” benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep Governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah

salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

Dalam konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

c. Prinsip-Prinsip Good Governance

Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance

diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli Pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi Pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan

yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat

6. Kesetaraan/Keadilan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good governance.

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

Ada tiga alasan penting yang melatar-belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan

bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep good-governance (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangat rendah.

Secara garis besar, permasalahan penerapan Good Governance meliputi :

1. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat
2. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan
3. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur

4. Makin meningkatnya tuntunan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
5. Meningkatnya tuntunan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum
6. Meningkatnya tuntunan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era reformasi.

Adapun beberapa konsep Good Governance, yaitu sebagai berikut:

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.
2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi

masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.

4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.
5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif), Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur & sumber daya secara efisien & efektif, Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan

keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.

11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.
12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup, Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara

konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

3. Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pengertian pelayanan menurut *American Marketing Association*, seperti dikutip oleh Donald (Hardiansyah 2011:10), bahwa:

“pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya juga mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”.

Menurut Poerwadarminta, dilihat dari sisi etimologis:

“pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian

pelayanan dapat diartikan sebagai perihal/cara melayani, service/jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa”.

Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktifitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri (Thoah, dalam Hardiansyah, 2011: 11).

Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah, yaitu memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari kualitas birokrasi pemerintah. Pada masa lalu, paradigma pelayanan publik memberi peran yang sangat besar kepada pemerintah sebagai sole provider (satu-satunya penyedia layanan). Peran pihak di luar pemerintah tidak pernah mendapatkan tempat. Masyarakat dan swasta hanya memiliki sedikit peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu prinsip *good governance* yang penting dalam pelayanan publik adalah partisipasi. Menurut Marschall (Umam, 2012: 380-381):

“tujuan dari partisipasi publik pada dasarnya mengomunikasikan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga

membantu dalam pelaksanaan pelayanan. Lebih jauh lagi peran masyarakat dalam pelayanan publik adalah keterlibatan dalam berdisiplin dan menaati aturan serta dukungan langsung dalam proses pemberian pelayanan publik”.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismara, Sunarno & Supardal (2010: 104-105) pada bagian implementasi *good governance* dalam sistem pelayanan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain pertama, Pemkot sudah cukup transparan dalam menyusun program kebijakan pembangunan dan pelayanan sudah merespon usulan warga. proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada kepentingan warga. Alokasi anggaran yang ditujukan untuk pemberdayaan warga masyarakat. Dengan tersedianya media komunikasi seperti UPIK sangat membantu Pemerintah Kota dalam merespon kebutuhan warga, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan. Kedua, dari sisi akuntabilitas telah berupaya untuk membantu masyarakat dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, seperti tercermin dalam pelayanan perizinan dengan membentuk Dinas Perizinan, sehingga bagi warga yang mengurus perizinan dilayani dalam satu pintu dan satu atap dengan dukungan teknologi yang cukup canggih.

Dalam hal ini pelayanan bisa lebih efisien dan mengurangi praktek rente (praktek suap/pungli) dalam pengurusan surat-surat perizinan. Ketiga, responsivitas Pemerintah Kota menjadikan sistem pelayanan satu atap model Dinas Perizinan sebagai roh birokrasi dalam memberikan pelayanan masyarakat cukup kuat. Bahkan sikap walikota yang lebih suka dipanggil "kepala pelayan"

menunjukkan komitmen melanjutkan sistem pelayanan yang responsif sebagai media umpan balik dalam pengambilan kebijakan. Keempat, partisipasi dalam pelayanan publik selalu diupayakan guna mendekatkan masyarakat dengan pemerintahnya. Berpartisipasi antara lain dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota melalui pengaduan dan keluhan yang disampaikan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota, maka akan tercipta transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam pemerintahan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atau pelanggan dapat dilakukan melalui pengukuran kepuasan masyarakat atau pelanggan, untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana pelayanan telah mampu memenuhi harapan atau dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan, maka organisasi harus mengetahui tingkat harapan pelanggan atau suatu atribut tertentu. Harapan pelanggan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kinerja aktualnya, sehingga dari sini akan diperoleh indeks kepuasan pelanggan yang mencerminkan kualitas pelayanan.

Terdapat 14 unsur yang “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:

- a. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- g. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
- i. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- j. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- k. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan.

- l. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- m. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- n. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- o. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

4. Pemerintahan

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-

badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan menurut Dr. H. Rachmat Maulana S.Sos, M.Si Secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata dasar *perintah* yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Penambahan awalan *pe* menjadi *pemerintah* berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

Pada beberapa literature yang ditulis para ahli, makna pemerintahan dibahas dari pengertian sempit dan dalam pengertian luas.

Dalam arti sempit dipahami sebagai segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, Eksekutif dan yudikatif.

Konsep pemerintahan dalam arti luas di atas, tampaknya didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teorinya yang sangat terkenal "*Trias Politica*" dalam bukunya "*L' Esprit des Lois*", membagi kekuasaan negara dalam 3 bidang yang terpisah satu sama lain, yaitu:

1. *Pouvoir Legislatif*, yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan perundang-undangan.
2. *Pouvoir Eksekutif*, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang.
3. *Pouvoir Yudikatif*, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar undang-undang tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan.

Baik dalam wacana keilmuaan pemerintahan maupun dalam pelaksanaannya, teori Montesquieu banyak mempengaruhi negara dalam mempraktekkan ajaran pemerintahan. Akan tetapi pada dataran praktek yang sesungguhnya banyak kendala, sehingga teori Trias Politica tidak dapat dijalankan secara murni atau sepenuhnya hal ini karena dalam praktek pemerintahn negara, termasuk di Amerika Serikat menggunakan asas “*check and balances*” antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Konsep dasar dari Pemerintah (*Government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat Pemerintahan Pusat maka konsep Pemerintah (*Government*) merujuk pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara beserta Para Kabinet Pemerintahan. Sedangkan Tata Pemerintahan (*Governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Di tingkat Pemerintahan Negara konsep Tata Pemerintahan (*Good Governance*) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut.

5. Kelurahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukan Warga (RW). Pemerintahan ditingkat desa dan kelurahan ditingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Berdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri 28/2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:

- Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling sedikit 3 km²
- Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK, dengan luas paling sedikit 5 km², dan
- Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK, dengan luas paling sedikit 7 km².

Serta memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan

yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut.

a. Ciri-ciri Kelurahan

Berikut ini ciri-ciri kelurahan yaitu:

- a. Berada dikecamatan kota/ibu kota kabupaten/kota madya
- b. Merupakan satuan perangkat kerja daerah
- c. Pendanaan jadi satu dalam APBD, tidak ada otonomi, tidak ada demokrasi dalam pemilihan lurah
- d. Lurah dipilih oleh bupati/kota melalui sekda, bersifat administratif, bukan bagian dari otonomi daerah

b. Fungsi Kelurahan

Berikut ini fungsi dari adanya kelurahan yaitu sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prsarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaa

lembaga kemasyarakatan

c. Perangkat Kelurahan

Perangkat Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak 4 seksi serta jabatan fungsional.

d. Pemimpin Kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Maka lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

6. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menunjang penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dianggap cukup penting oleh penulis karena sekaligus juga menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini dapat diketahui. Penelusuran ini juga sebagai tindakan penulis untuk membuktikan bahwa fokus penelitian yang dilakukan sekarang ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini akhirnya dapat terjamin. Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

No.	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	A. Muh. Ikhsan	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan <i>Good Governance</i> dalam pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri- Donri Kabupaten Soppeng? 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan <i>Good Governance</i> dalam pemerinatahan Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya produk hukum mengenai standar operasional prosedur 2. Faktor yang menghambat pelaksanaan <i>Good Governance</i> yaitu faktor penegak hukumnya, seperti aparat desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya
2.	Dian Pertiwi	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Pada Dispenda Provisi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan? 2. Bagaimana kontribusi sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi sistem pengendalian pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan telah diterapkannya dengan membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik. 2. Implementasi sistem pengendalian intern memberikan kontribusi yang baik bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menciptakan prinsip <i>Good Governance</i> yakni transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan kemandirian.

3.	Christo Astriandy	Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone	Apakah pemerintahan Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone telah menerapkan prinsip <i>Good Government Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa?	Prinsip dari <i>Good Government Governance</i> ini telah diterapkan oleh pemerintahan Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, namun tidak semua prinsip dari <i>Good Government Governance</i> sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip Good Government Governance yang telah diterapkan yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, efektif dan efisien, dan prinsip fairness (keadilan dan kesetaraan). Sedangkan prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.
----	-------------------	--	--	---

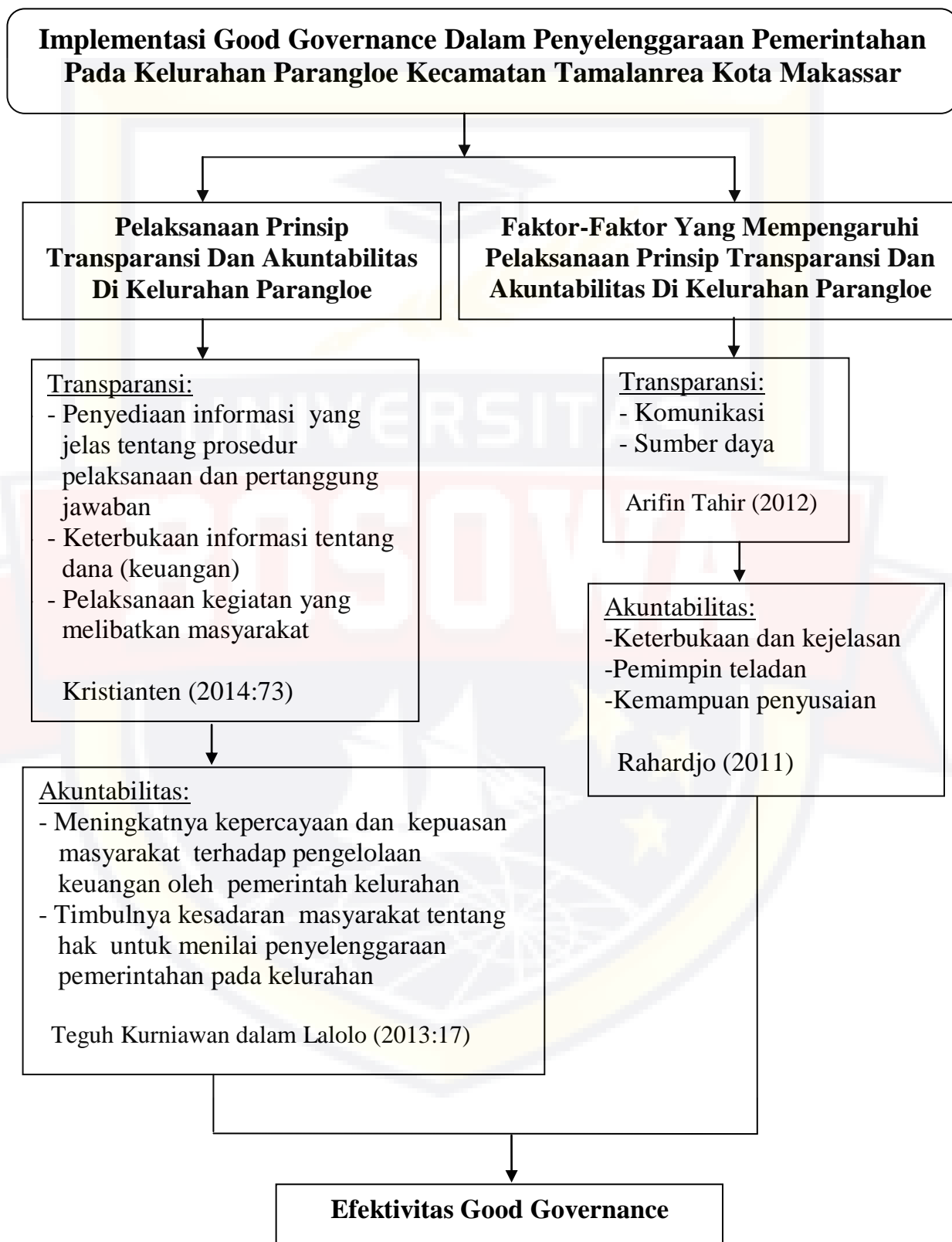
7. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis. Penyelenggaraan pemerintahan kemudian di analisis dalam bingkai prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya adalah prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang mengambil acuan sesuai dengan pengertian Good Governance menurut Kashi Nisjar yang mengemukakan bahwa “secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum”.

Dalam kaitan ini, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kristianten (2014:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur dari beberapa indikator antara lain penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi tentang dana (keuangan) dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2013:17) indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah kelurahan dan timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, menurut teori Arifin Tahir (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip transparansi yaitu komunikasi dan sumber daya. Kemudian menurut Rahardjo (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip akuntabilitas yaitu keterbukaan dan kejelasan, pemimpin teladan, dan kemampuan penyusaian.

Tabel 1. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

a. Tipe dan Data Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kualitatif, sebagai penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Sedangkan jenis penelitiannya adalah Deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deksriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilaksanakan Di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Kelurahan Parangloe masih jauh dari penerapan/implementasi good governance dan belum terlaksana dengan baik khususnya tentang Transparansi dan Akuntabilitas. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai dengan 23 Maret 2019.

c. Informan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan focus penelitian. Sumber data primer terdiri dari :

- | | |
|----------------------|---------|
| i. Lurah | 1 Orang |
| ii. Sekretaris Lurah | 1 Orang |
| iii. Warga | 7 Orang |

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari :

- a. Dokumen kantor kelurahan
- b. Penelusuran data online

- c. Dokumentasi
- d. Buku/Jurnal

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang memegang peranan penting dalam suatu kegiatan penelitian. Pengumpulan data harus disusun secara sistematis agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:

- Wawancara

Adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari info dengan sumber alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari info dengan sumber info (Nawawi, 2001:111)

- Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan data yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan. Pengamatan dianggap cocok untuk meneliti bagaimana manusia berperilaku dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan mereka yang biasa, rutin dan alamiah.

- Studi Literatur/Dokumen

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

e. Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan disleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti.

Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jaman Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui 4 alur penerapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dari sumber data melalui teknik wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan dalam wawancara dapat langsung dianalisis oleh peneliti. Apabila jawaban yang diperoleh belum memuaskan atau belum cukup, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi sampai data dianggap valid.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksi, meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polahnya serta membuang yang tidak perlu.

3. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penerikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah

dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

1. Geografis

Kelurahan Parangloe adalah salah satu Kelurahan dari Delapan Kelurahan yang terletak pada wilayah administrasi Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, dengan posisi geografis 05O5'34.07"S dan 119O27'25.78"E. Adapun batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea
- Sebelah Selatan : Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo
- Sebelah Timur : Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Kelurahan Parangloe hanya ditempuh melalui jalur darat selama ± 20 menit dengan jarak dari Ibukota Kecamatan sekitar 5-10 Km.

Kelurahan Parangloe memiliki luas 6,53 Km² yang merupakan Kelurahan terluas kedua di wilayah Tamalanrea. Tutupan wilayah umumnya didominasi oleh pemukiman dan fasilitas umum yaitu sekitar 78%, wilayah persawahan sekitar 21% dan selebihnya adalah pekarangan, perkantoran dan pekuburan. Sebelah Utara Parangloe

digunakan sebagai pemukiman, pada bagian tengah ke arah Selatan merupakan lokasi tambak, bagian tengah ke arah Utara digunakan sebagai lahan persawahan.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kelurahan Parangloe sebanyak 6.727 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 3.336 jiwa laki-laki (49.59%) dan 3.391 jiwa perempuan (50,41%). Kepadatan penduduk tercatat 1.030 jiwa per Km², jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.354 KK. Suku/etnis penduduk di Kelurahan Parangloe adalah mayoritas dari suku makassar sekitar 6.257 jiwa, kemudian suku bugis sekitar 3.843 jiwa dan Cina 32 jiwa.

3. Perumahan

Perumahan di Kelurahan Parangloe pada umumnya terdiri dari rumah kayu/panggung dan semi permanen yang dimana perumahan di Kelurahan Parangloe sangatlah berdekatan diantara satu rumah dengan rumah lainnya.

4. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kelurahan Parangloe di dominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat yaitu sekitar 1.962 jiwa sedangkan pada tingkat pendidikan tertinggi yaitu tamat S1 dan S2 sekitar 60 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang

hanya tamat SD/ sederajat menunjukkan kondisi pendidikan di daerah Parangloe tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah sarana pendidikan untuk tingkatan lanjut tidak disediakan di Kelurahan Parangloe.

5. Kesehatan

Sarana dan prasarana untuk membantu kesehatan penduduk di Kelurahan Parangloe yaitu Pustu (Puskesmas Pembantu) sebanyak 1 gedung dan posyandu sebanyak 7 gedung dalam kondisi yang baik dan masih aktif dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan Parangloe.

6. Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Parangloe mayoritas beragama Islam dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajian yang dilakukan tiap minggu di masjid. Tingginya kepercayaan terhadap agama Islam sehingga banyak masyarakat yang menjual lokasi tambak mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu naik haji.

7. Perekonomian

Masyarakat Kelurahan Parangloe bekerja disektor budidaya perikanan, pertanian, jasa angkutan, industri kecil, peternakan, nelayan dan pegawai instansi pemerintah. Nelayan dan buruh tani adalah jenis mata pencaharian yang banyak diminati masyarakat.

8. Sosial Budaya

Sosial budaya yang berada di Kelurahan Parangloe seringkali terjadi interaksi antar masyarakat nelayan dan petambak ikan untuk saling bertukar pendapat tentang penangkapan dan pola budidaya tambak.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Melayani Masyarakat Di Kelurahan Parangloe

Pembahasan pada bab ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil di himpun pada saat penulis melakukan penelitian di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Data yang di maksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan penelitian. Penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian, untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, berikut ini merupakan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe, *yaitu:*

1. Prinsip Transparansi

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dalam hal ini rakyat secara pribadi dapat mengetahui

secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dari pelaksanaannya dalam arti lain bahwa segala kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus selalu secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Didalam pelaksanaan prinsip transparansi, dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini:

a. Penyediaan Informasi Yang Jelas Tentang Prosedur

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Penyediaan informasi menjadi suatu hal yang penting dilaksanakan dalam pelaksanaan prinsip transparansi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan lurah Parangloe yang menyatakan bahwa:

“Mengenai penyediaan informasi, semua informasi-informasi tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan program-program yang sudah disepakati oleh masyarakat. Saat ini kan kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringkali diberikan janji palsu oleh pemerintah. Maka dari itu, kami selaku aparat pemerintah di Kelurahan Parangloe melakukan yang terbaik agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang jelas”. (Andi Zakaria, 19 Maret 2019)

Petikan hasil wawancara dengan lurah Parangloe diatas memberikan penjelasan bahwa penyediaan informasi dilaksanakan dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris lurah,

yang menyatakan bahwa:

“Kita tidak ada yang tertutup. Mengenai ketersediaan informasi, informasi apapun yang diperlukan dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung”. (Akbar Husain, 19 Maret 2019)

Hasil wawancara tersebut membenarkan bahwa penyediaan informasi dalam pelaksanaan prinsip transparansi sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah di kelurahan Parangloe.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam implementasi good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga diperlukan tanggapan-tanggapan dari masyarakat agar dapat mengetahui apakah pelaksanaan prinsip transparansi benar-benar telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah di kelurahan Parangloe.

Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di kelurahan Parangloe yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, ketersediaan informasi di Kelurahan sudah sangat baik. Kita sebagai masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi-informasi apa saja yang terkait dengan program-program atau kegiatan-kegiatan di Kelurahan”.
(H. Nyarrang, 20 Maret 2019)

Pendapat lain dari masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kalau tentang ketersediaan informasi, saya rasa sudah sangat baik. Kita sebagai masyarakat itu tidak kesulitan untuk memperoleh informasi-informasi karena tersedianya papan-papan informasi di Kelurahan”. (H. Mustari, 30 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan masyarakat tersebut membuktikan

bahwa penyediaan informasi dalam pelaksanaan prinsip transparansi sudah dijalankan dengan baik yang didukung oleh ketersediaan papan-papan informasi di kantor kelurahan Parangloe tersebut.

b. Keterbukaan Informasi Tentang Dana

Pelaksanaan prinsip transparansi dilihat dari indikator kedua yaitu keterbukaan informasi tentang dana. Keterbukaan informasi tentang sumber dana dan pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan Parangloe. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat di kelurahan Parangloe, yang menyatakan bahwa:

“Transparansi sumber dana dan pengelolaan keuangan sangat nampak dan jelas, baik itu dari sumber pendapatan dan pengelolaan atau pengalokasian dana tersebut”. (Agus Salim, 20 Maret 2019)

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh masyarakat yang lain saat diwawancarai menyatakan bahwa:

“Sumber dana dan pengelolaan keuangan sangat transparan. Bahkan sumber anggaran beserta pembelanjaan dari perencanaan juga sangat terperinci”. (Ahmad Ismail, 20 Maret 2019)

Petikan hasil wawancara dari masyarakat di kelurahan Parangloe menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tentang dana sudah dijalankan dengan baik dalam mendukung terlaksananya

prinsip transparansi.

c. Pelaksanaan Kegiatan Yang Melibatkan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan atau program kerja kelurahan Parangloe juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip transparansi. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Iya, masyarakat ikut serta seperti misalnya kegiatan 17an, kegiatan ibu PKK yang diadakan tiap bulan, membersihkan lingkungan tiap minggu. (Nur Alam Amalia, 20 Maret 2019)

Tanggapan yang sama dari masyarakat yang lain, yang menyatakan bahwa:

“Iya, aparat pemerintah di kelurahan parangloe melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja kelurahan. Contoh kemarin waktu ada kegiatan festival anak muslim, yang menjadi panitia pelaksanaannya itu anak-anak remaja masjid di kelurahan Parangloe”. (Nita, 20 Maret 2019)

Dari hasil wawancara tersebut diatas membuktikan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program kerja di kelurahan Parangloe.

5. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan

dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Didalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas, dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini:

a. Meningkatnya Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan adalah salah satu poin penting dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Oleh sebab itu, pemerintah kelurahan harus berupaya bagaimana cara agar tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat itu dapat ditumbuhkan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan lurah Parangloe yang menyatakan bahwa:

“Agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban diserahkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dana yang ada dikelola untuk apa jadi dapat meningkatkan kepercayaan mereka kepada pemerintah kelurahan dalam hal pengelolaan keuangan”. (Andi Zakaria, 21 Maret 2019)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh sekretaris lurah yang menyatakan bahwa:

“Sama halnya dengan yang saya katakan tadi bahwa pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah kelurahan kepada masyarakat sudah sepenuhnya berjalan, nah hal inilah yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat karena masyarakat ikut dilibatkan sehingga mereka bisa

mengetahui dana yang dikelola seperti apa, untuk apa, dan bagaimana”. (Akbar Husain, 21 Maret 2019)

Dari hasil wawancara dari aparat pemerintah kelurahan Parangloe diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan sudah berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dengan cara pertanggungjawaban diserahkan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui sendiri seperti apa pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut.

b. Timbulnya Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Untuk Menilai Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat memiliki hak untuk menilai tentang kinerja aparat pemerintahan.

Berikut ini hasil wawancara dengan masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap keluhan-keluhan masyarakat.

“Terkait keluhan-keluhan masyarakat baik itu dilingkungan tempat tinggal, masalah sampah ataupun dari masalah-masalah pencurian dilimpahkan kepada ketua RT dan ketua RW, kemudian dilanjutkan ke kelurahan dan pihak-pihak yang terkait atas keluhan tersebut dan diketahui oleh kelurahan untuk ditindak lanjuti bersama. Dan terkait keluhan-keluhan pelayanan yang terdapat di kelurahan itu sangat memuaskan akan pelayanan dan informasi yang diberikan karena sudah pasti orang-orang profesional semua yang ditempatkan disana. Apalagi lurah sekarang masih muda, pikirannya masih fresh dan pengalamannya di kelurahan sudah banyak”.

(Agus Salim, 21 Maret 2019).

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari masyarakat yang lain, yang menyatakan bahwa:

“Terkait pertanggungjawaban pemerintah kelurahan terhadap keluhan-keluhan masyarakat, pemerintah di kelurahan parangloe sangat bertanggung jawab kalau menurut saya. Contoh kemarin waktu ada masyarakat yang mengeluh karena lorongnya gelap kalau malam dan kumuh, tidak ambil waktu lama para peran di kelurahan langsung sosialisasi dengan pak RT, nah habis itu ditindak lanjuti keluhan tersebut. Mereka gerakannya cepat kalau menurut saya”. (Ahmad Ismail, 21 Maret 2019)

Namun, ada pula beberapa masyarakat yang masih mengeluh terkait pertanggungjawaban pemerintah kelurahan terhadap keluhan-keluhan mereka. Berikut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat.

“Mengenai tanggung jawab pemerintah dengan keluhan masyarakat saya kira saya sebagai masyarakat belum melihat tindakan seperti misalnya kami mengeluhkan polusi-polusi atau dampak dari perusahaan-perusahaan yang dapat mencemarkan lingkungan, juga berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri”. (Nur Alam, 21 Maret 2019)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh masyarakat yang lainnya, yang menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai tanggungjawab terhadap keluhan-keluhan, sampai saat ini saya belum melihat tindakan aparat kelurahan terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah pabrik perusahaan, yang berdampak buruk bagi kesehatan”. (Nita, 21 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, diketahui bahwa

pemerintah di kelurahan Parangloe sudah bertanggungjawab terhadap keluhan-keluhan mereka, namun beberapa masyarakat masih ada yang belum melihat tindakan pertanggungjawaban aparat pemerintah kelurahan terkait keluhan-keluhan mereka tentang dampak dari limbah pabrik yang menimbulkan pencemaran udara.

Dari analisis diatas, prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya baik karena masih ada beberapa masyarakat yang belum melihat tindakan pertanggungjawaban dari aparat pemerintah di kelurahan Parangloe.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

1. Prinsip Transparansi

Dalam membahas faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi, ada dua faktor yang berpengaruh yaitu komunikasi dan sumber daya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut pembahasannya:

a. Komunikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan Parangloe, komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui penyebaran

informasi yang dapat diakses oleh publik dari berbagai macam sumber yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan lurah parangloe yang menyatakan bahwa:

“Upaya-upaya yang kami lakukan dalam hal komunikasi dengan publik antara lain, pertama kami menyediakan papan-papan informasi untuk memudahkan masyarakat mengetahui atau mengakses informasi-informasi yang terkait dengan program kerja kelurahan dan lain sebagainya. Yang kedua, kami mengadakan musyawarah dengan mengundang seluruh masyarakat untuk menyampaikan secara langsung apa saja program-program kerja pemerintah kelurahan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin dilaksanakan sehingga masyarakat juga bisa terlibat dalam kegiatan tersebut”. (Andi Zakaria, 22 Maret 2019)

Sementara, sekretaris lurah menyatakan maksud yang hampir sama seperti pernyataan dibawah ini:

“Sehubungan dengan penyediaan informasi tersebut, pemerintah di kelurahan Parangloe berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pemerintahan yang baik, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. (Akbar Husain, 22 Maret 2019).

Pernyataan lurah dan sekretaris lurah yang dimaksud diatas sejalan dengan pernyataan beberapa warga. Berikut hasil wawannya:

“Menurut saya, komunikasi secara langsung sudah dilaksanakan dengan baik, aparatur pemerintah di kelurahan Parangloe sering mengadakan sosialisasi dan komunikasi secara tidak langsung yaitu ketersediaan informasi di Kelurahan sudah sangat baik.

Kita sebagai masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi-informasi apa saja yang terkait dengan program-program atau kegiatan-kegiatan di kelurahan melalui papan-papan informasi yang tersedia”. (H. Mustari, 22 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:

“Untuk mengenai sosialisasi dari kelurahan, contohnya kemarin mengenai pertanian. Sebelum pegawai dari pertanian masuk ke kelurahan, kelurahan terlebih dahulu memberi informasi kepada masyarakat dengan membuat semacam kelompok tani. Jadi, jika ada sosialisasi terkait pertanian seperti contohnya kemarin mengenai sosialisasi penanaman sistem legowo, kelurahan menginformasikan kepada RT dan RW kemudian RT dan RW menginformasikan kepada kelompok-kelompok tani di kelurahan Parangloe. Jadi mungkin jika mengenai sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat atau kelompok-kelompok, itu sudah bagus”. (Agus Salim, 22 Maret 2019)

Pernyataan diatas tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Nurhayati yang menyatakan bahwa:

“Komunikasi secara langsung, pelaksanaan sosialisasi sudah bagus. Pemerintah kelurahan selalu mensosialisasikan apa saja program dan kegiatan kelurahan agar masyarakat bisa tau. Komunikasi secara tidak langsung, papan-papan informasi sudah tersedia sehingga kita bisa mengetahui pula informasi-informasi melalui papan-papan informasi tersebut”. (Nur Hayati, 22 Maret 2019)

b. Sumber Daya

Suksesnya pelaksanaan prinsip transparansi tidak lepas dari adanya kontribusi konkrit dari implementor kebijakan transparansi, disamping daya dukung fasilitas dan anggaran yang jelas dari

pemerintah daerah.

Berikut hasil wawancara dengan lurah parangloe yang menyatakan bahwa:

“Mengenai sumber daya, sumber daya manusia di kelurahan Parangloe itu sudah sangat memadai. Fasilitas seperti sarana dan prasarana juga memadai karena tiap tahun kita itu ada bantuan”. (Andi Zakaria, 22 Maret 2019)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan sekretaris lurah yang menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia disini sudah memadai, setiap kita mengadakan program-program atau kegiatan-kegiatan kita selalu pakai masyarakat yang ada disekitar sini. Sarana dan prasarana juga alhamdulillah memadai karena kita selalu ada bantuan-bantuan setiap tahun”. (Akbar Husain, 22 Maret 2019)

2. Prinsip Akuntabilitas

Dalam membahas faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi, ada dua faktor yang berpengaruh yaitu komunikasi dan sumber daya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut pembahasannya:

a. Keterbukaan dan Kejelasan

Keterbukaan dan kejelasan menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik.

Berikut ini beberapa hasil wawancara dengan warga mengenai

keterbukaan dan kejelasan pemerintah di kelurahan Parangloe:

“Sudah jelas dan terbuka. Contohnya jika ada kegiatan, dananya jelas dari mana dan pengelolaannya seperti apa karena pemerintah kelurahan menyampaikan kepada masyarakat”.
(H. Nyarrang, 23 Maret 2019)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah satu warga yang menyatakan bahwa:

“Penyediaan informasi di Kelurahan tersedia dengan baik, terbuka dan jelas. Informasi apapun yang kita perlukan atau yang ingin kita ketahui mudah diperoleh dengan mendatangi langsung kantor Kelurahan. Mereka tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya jelas kalau menurut saya. Itukan memang fungsi pemerintahan”. (Ahmad Ismail, 23 Maret 2019)

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan H. Nyarrang yang menyatakan bahwa:

“Saya rasa sudah terbuka dan jelas, apalagi terkait tentang ketersediaan informasi, saya rasa sudah sangat baik. Kita sebagai masyarakat itu tidak kesulitan untuk memperoleh informasi-informasi karena tersedianya papan-papan informasi di Kantor Kelurahan”. (H. Nyarrang, 23 Maret 2019)

b. Pemimpin Teladan

Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi orang lain atau bagi masyarakat yang dipimpinnya. Layaknya posisi seorang ibu dan ayah bagi anak dalam lingkungan keluarga, maka seorang pemimpin juga seolah menjadi orang tua bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa warga:

“Kalau menurut saya, para aparat pemerintah di kelurahan Parangloe merupakan pemimpin yang teladan. Mereka mengembang amanah dengan baik, menerima perbedaan pendapat dan bisa menerima kritisi dengan ikhlas sehingga kita juga merasa nyaman dibawah kepemimpinan mereka”. (Nita, 23 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agus Salim yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, mereka (aparat pemerintah di kelurahan) sudah bisa dikatakan pemimpin yang teladan. Mereka tidak cepat mengambil keputusan, mereka terlebih dahulu memufakatkannya, menerima kritik, pendapat maupun perbedaan”. (Agus Salim, 23 Maret 2019)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Nita yang menyatakan bahwa”

“Iya mereka sudah mampu dikatakan pemimpin yang teladan. Mereka merakyat, adil, mampu menerima kritikan maupun saran”. (Nita, 23 Maret 2019)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tersedianya informasi-informasi yang jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diperoleh dan dipahami oleh masyarakat. Pemerintah di kelurahan Parangloe juga sangat terbuka terkait sumber dana dan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan jelas dari mana sumber dana dan bagaimana penggunaannya. Pemerintah kelurahan juga selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah di kelurahan Parangloe.
2. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam melayani masyarakat di kelurahan Parangloe sudah terlaksana namun belum bisa dikatakan berjalan dengan baik atau belum bisa dikatakan sepenuhnya

akuntabel/bertanggungjawab. Pemerintah kelurahan Parangloe sudah berupaya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Namun terkait keluhan-keluhan masyarakat, sebagian masyarakat menilai bahwa pemerintah belum melakukan tindakan terhadap keluhan-keluhan mereka tentang dampak limbah perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip transparansi adalah komunikasi dan sumber daya.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas adalah keterbukaan dan kejelasan, pemimpin teladan dan kemampuan penyusaian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan Pada Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berjalan lebih optimal lagi, maka ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan yaitu:

1. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam melayani masyarakat di Kelurahan Parangloe yang sudah terlaksana dengan baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan demi kesejahteraan

masyarakat.

2. Untuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas agar terlaksana dengan baik dalam melayani masyarakat, pemerintah kelurahan sebaiknya segera melakukan tindakan terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
3. Perlu dilakukan kontrol publik, aparat kelurahan dapat memfasilitasinya dengan menyediakan kotak saran, sehingga bagi siapa saja yang ingin menyampaikan sesuatu untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan di Kantor Lurah dapat segera melakukannya tanpa harus bertemu langsung dengan Lurah atau aparat kelurahan lainnya.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab, Solichin. 2012. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:

Universitas Muhammadiyah Malang Press

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Adrianto. 2014. *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik*

Melalui E-Government. Bayumedia, IKAPI Jatim.

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*,

Word Press, 2010

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2013, Universitas Pepabri Makassar, 2013

Ar. Mustopadidjaja. 2013. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi*

Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc,

London-England, Goggin, Malcolm L et al, 2011

Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gava Media

- Ismara, Ima, Sunarno, Affirio & Supardal. 2010. *Inovasi Implementasi Good Governance di Kota Yogyakarta*. Penelitian Program Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Rekayasa. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Jones, Charles O., 2015. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers
- Kristianten. 2014. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kurniawan, Teguh. 2013. *Hambatan dan Tantangan Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Jakarta
- Mardiasno, 2014. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 2010
- Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta, 2012
- Miles & Huberman dalam Sugiyono. 2010. *Teknik Analisis Data*. Jakarta: UI Pres
- Meter, Van dan Horn. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Mter dan Horn*. Jakarta
- Moleong, L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosda Karya Offset, Bandung

Mulyana, Dedi. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nawawi. 2011. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nisjar, Kashi. 2011. *Memahami Good Governance*. Bnadung: Buku Gava Media

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 2010

Rahardjo. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah*. Jakarta

Ripley, Randal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 2012

Sabatier, Paul. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, 2011

Santoso, Purwo dkk. 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Dari Good Governance Menuju Just And Democratic Governance*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Syafei, I.K. 2013. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sedarmayanti, 2014. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian kedua*. CV. Mandar Maju: Bandung

Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung. Pustaka Setia

Usman, Husaini. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sumber Internet :

<http://kertyawitaradya.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018

Celotehlestarius.blogspot.com. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018

repository.fisip-untirta.ac.id. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019

etheses.uin-malang.ac.id. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kelurahan

Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: CV. Eko Jaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan*

Daerah. Jakarta: CV. Eko Jaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008. *Pemerintahan*

Daerah. Jakarta: CV. Eko Jaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. *Pelayanan*

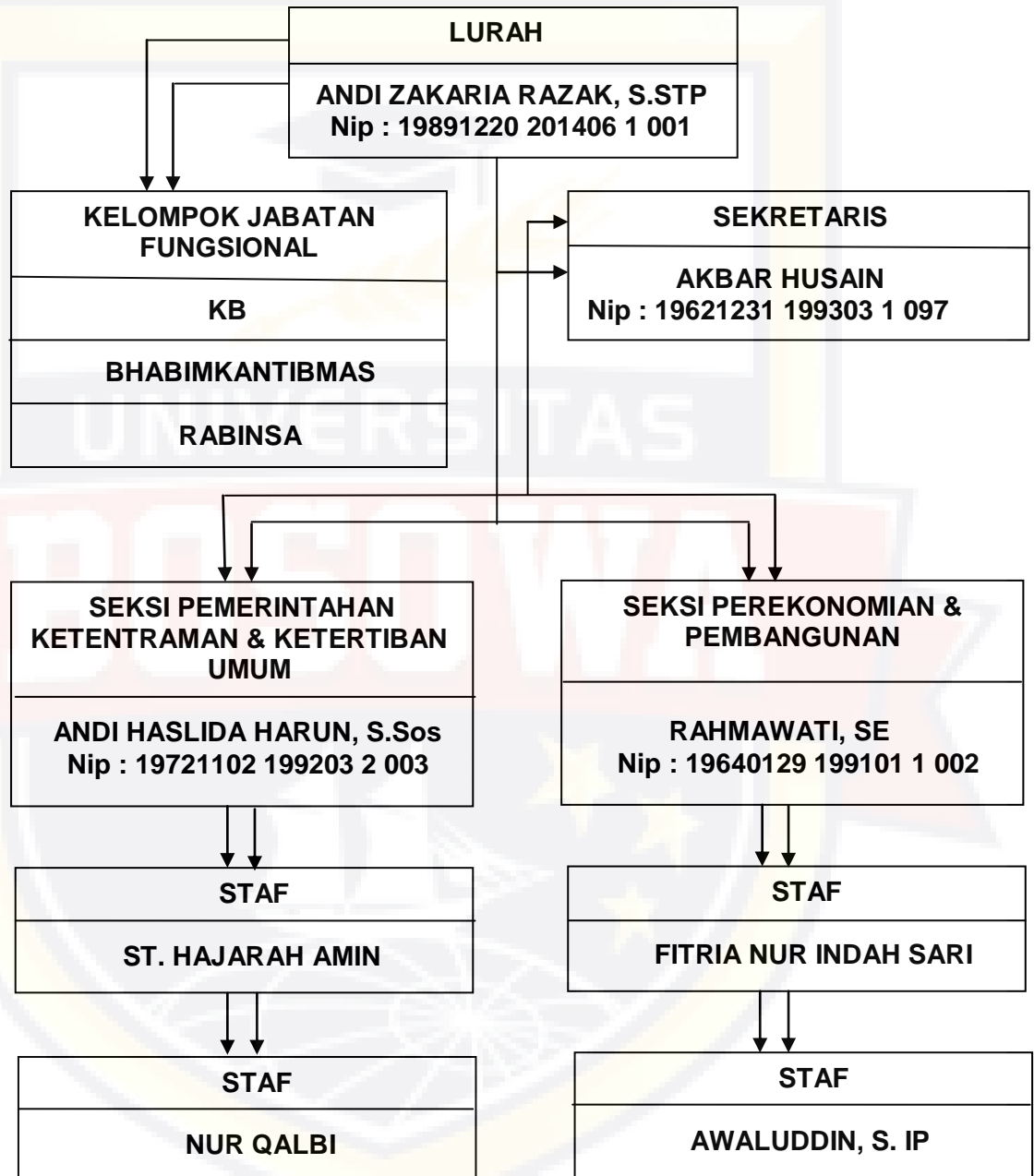
Publik. Jakarta: CV. Eko Jaya





UNIVERSITAS
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BOSOWA

**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PARANGLOE
KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**



(Sumber: Kantor Kelurahan Parangloe)



Kantor Kelurahan Parangloe



Ruang Musyawarah Atau Rapat



Lurah Parangloe

Saat melakukan wawancara terkait tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe



Sekretaris Lurah

Saat melakukan wawancara terkait tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.073/FSP/UNIBOS/III/2019
 Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
 Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,
 Kantor Kelurahan Parangloe**

**Di-
 Makassar**

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Hasriani
NIM	: 45 15 021 010
Judul penelitian	: Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
Tempat	: Kelurahan Parangloe
Waktu	: 19 Maret – 23 Maret 2019

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 18 Maret 2019
 Dekan Fisip Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
 Nidn : 09271107602

Tembusan :
 1. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALANREA
 KELURAHAN PARANGLOE

Jl. Bontoa Raya (Tol Sutami) No. 47 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar



Makassar, 19 Maret 2019
 Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Isipol
 Universitas Bosowa
 di- Tempat

Nomor : 471/ 16 /PRL/III/2019.
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Hasil Pelaksanaan Penelitian

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Universitas Bosowa Nomor : A.073/FSP/UNIBOS/III/2019

Tanggal 18 Maret 2019. Perihal tersebut diatas maka bersama ini di sampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa.

Nama : Hasriani

Nim : 45 15 021 010

Judul Penelitian : **Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan**

Pemerintah Pada Kelurahan Parangloe, Kecamatan

Tamalanrea, Kota Makassar

Tempat : Kelurahan Parangloe

Waktu : 19 Maret – 23 Maret 2019

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGARAAN
 PEMERINTAHAN PADA KELURAHAN PARANGLOE KECAMATAN TAMALANREA
 KOTA MAKASSAR** sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 23 Maret 2019,
 dan telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.



ANDI ZAKARIA RAZAK, S.STP,MM

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Nip : 19891220 201406 1 001

Lampiran I

NASKAH WAWANCARA

UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI KELURAHAN PARANGLOE

Naskah wawancara ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar untuk melakukan wawancara kepada informan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengalami perkembangan atau perubahan, tergantung pada situasi. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pemerintah Kelurahan

a. Transparansi

1. Siapa nama anda?
2. Berapa usia anda?
3. Apa jabatan anda?
4. Bagaimana penyediaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?
5. Upaya-upaya apakah yang dilakukan/ditempuh pemerintah Kelurahan Parangloe dalam penyediaan informasi di Kelurahan Parangloe?
6. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi mengenai dana (keuangan)?
7. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam kaitannya dengan pelayanan administrasi di Kelurahan Parangloe?
8. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dan mendukung pelaksanaan prinsip transparansi?

b. Akuntabilitas

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan?
3. Bagaimana meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Kelurahan Parangloe?
4. Apakah sarana dan prasarana telah memadai dan mendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas?

B. Masyarakat

1. Siapa nama anda?
2. Berapa usia anda?
3. Apa pekerjaan/jabatan anda?
4. Bagaimana penyediaan informasi mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?
5. Menurut anda, apakah pemerintah di Kelurahan Parangloe sudah transparan mengenai sumber dana dan pengelolaan keuangan?
6. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi terkait pelayanan administrasi di Kelurahan Parangloe? Apakah sudah berjalan dengan baik?
7. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja pemerintah di Kelurahan Parangloe?
8. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?
9. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah di Kelurahan Parangloe terkait keluhan-keluhan masyarakat?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA PENELITIAN Tim Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (TKPP)		
1. Nama Lengkap : Andi Zakaria Razak, S.STP 2. Pendidikan : S1 3. Pekerjaan/Jabatan : Lurah 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki 5. Usia : 30 Tahun		
No.	Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	Bagaimana penyediaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?	Mengenai penyediaan informasi, semua informasi-informasi tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan program-program yang sudah disepakati oleh masyarakat. Saat ini kan kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah. Maka dari itu, kami selaku aparat pemerintah di Kelurahan Parangloe melakukan yang terbaik agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang jelas.

2.	<p>Upaya-upaya apakah yang dilakukan/ ditempuh pemerintah Kelurahan Parangloe dalam penyediaan informasi mengenai pelaksanaan prinsip transparansi di Kelurahan Parangloe?</p>	<p>Upaya-upaya yang kami lakukan antara lain, pertama kami menyediakan papan-papan informasi untuk memudahkan masyarakat mengetahui atau mengakses informasi-informasi yang terkait dengan program kerja kelurahan dan lain sebagainya. Yang kedua, kami mengadakan musyawarah dengan mengundang seluruh masyarakat untuk menyampaikan secara langsung apa saja program-program kerja pemerintah kelurahan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin dilaksanakan sehingga masyarakat juga bisa terlibat dalam kegiatan tersebut.</p>
3.	<p>Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi mengenai dana (keuangan)?</p>	<p>Mengenai penerapan prinsip transparansi terkait keterbukaan informasi mengenai dana atau keuangan, kita disini sudah sangat transparan, kita tidak ada yang tertutup. Segala bantuan-bantuan, sumber-sumber dana atau semacamnya itu langsung kita sampaikan ke masyarakat, UKM, kelompok-kelompok tani dan lain-lain.</p>
4.	<p>Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam kaitannya dengan pelayanan administrasi di Kelurahan Parangloe?</p>	<p>Untuk masalah terbuka kepada masyarakat terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan administrasi saya pikir kami sebagai aparat kelurahan sudah cukup baik dalam hal tersebut. Kami selalu memberitahu apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan disini juga tersedia papan-papan informasi. Kami sudah menjalankan tugas dan wewenang kami sebagai aparat kelurahan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu pula sudah sesuai dengan apa yang diembankan dari kecamatan kepada kami. Keterbukaan juga mengenai biaya saya rasa sampai sekarang masyarakat sudah cukup mengetahui bahwa di kelurahan kami sudah tidak ada pungutan apa-apa lagi dalam setiap pengurusan administrasi karena semuanya sudah gratis sekarang. Pelayanan yang kami berikan pun kami rasa sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.</p>

5.	<p>Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?</p>	<p>Pelaksanaan sosialisasi selalu kami adakan. Kami selalu turun langsung menyampaikan kepada masyarakat tentang apa-apa saja program-program pemerintah di kelurahan Parangloe agar masyarakat bisa mengetahui dan bisa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.</p>
6.	<p>Bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan?</p>	<p>Pertanggungjawaban kita ada dua yaitu kepada kecamatan dan kepada masyarakat. Terkait anggaran-anggaran kelurahan itu kita sampaikan semuanya jadi masyarakat bisa tau. Kita sudah sangat berusaha dalam mempertanggungjawabkan dari masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di kelurahan Parangloe.</p>
7.	<p>Bagaimana meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Kelurahan Parangloe?</p>	<p>Agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban diserahkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dana yang ada dikelola untuk apa jadi dapat meningkatkan kepercayaan mereka kepada pemerintah kelurahan dalam hal pengelolaan keuangan.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Lengkap : Agus Salim, S.Sos 2. Pendidikan : S1 3. Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki 5. Usia : 24 Tahun 	
No.	Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	<p>Bagaimana penyediaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?</p>	<p>Penyediaan informasi di Kelurahan tersedia dengan baik. Informasi apapun yang kita perlukan atau yang ingin kita ketahui mudah diperoleh dengan mendatangi langsung Kantor Kelurahan. Mereka tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya jelas kalau menurut saya.</p>
2.	<p>Menurut anda, apakah pemerintah di Kelurahan Parangloe sudah transparan mengenai sumber dana dan pengelolaan keuangan?</p>	<p>Transparansi sumber dana dan pengelolaan keuangan sangat nampak dan jelas, baik itu dari sumber pendapatan dan pengelolaan atau pengalokasian dana tersebut.</p>

3.	<p>Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi terkait pelayanan administrasi di Kelurahan Parangloe? Apakah sudah berjalan dengan baik?</p>	<p>Penerapan prinsip transparansi di kelurahan Parangloe itu sangat bagus seperti contohnya pelayanan publik atau informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dan aparat pemerintah di Parangloe sangat bekerja maksimal terhadap pelayanan masyarakat. Itukan memang fungsi pemerintahan.</p>
4.	<p>Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja pemerintah di Kelurahan Parangloe?</p>	<p>Setiap program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan Parangloe selalu melibatkan masyarakat dan ormas yang ada didalamnya, baik itu Karang Taruna ataupun Remaja Masjid.</p>
5.	<p>Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe?</p>	<p>Penyelenggaraan sosialisasi di kelurahan Parangloe selalu dilakukan, baik itu dibidang lingkungan, pertanian ataupun sosialisasi-sosialisasi kesehatan yang bekerja sama dengan isntansi-instansi terkait untuk pemberian informasi dan ilmu kepada masyarakat.</p>

6.	Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah di Kelurahan Parangloe terkait keluhan-keluhan masyarakat?	<p>Terkait keluhan-keluhan masyarakat baik itu dilingkungan tempat tinggal, masalah sampah ataupun dari masalah-masalah pencurian dilimpahkan kepada ketua RT dan ketua RW, kemudian dilanjutkan ke kelurahan dan pihak-pihak yang terkait atas keluhan tersebut dan diketahui oleh kelurahan untuk ditindak lanjuti bersama. Dan terkait keluhan-keluhan pelayanan yang terdapat di kelurahan itu sangat memuaskan akan pelayanan dan informasi yang diberikan karena sudah pasti orang-orang profesional semua yang ditempatkan disana.</p> <p>Apalagi lurah sekarang masih muda, pikirannya masih fresh dan pengalamannya di kelurahan sudah banyak.</p>
----	--	---



BIODATA PENULIS



Hasriani, Dilahirkan di Ujung Pandang tepatnya di Tamala'lang, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, pada tanggal 12 Juli 1997. Anak tunggal dari pasangan Bapak Salim dan Ibu Hj. Nursiah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyah Bustanul Affah pada tahun 2004. Lalu melanjutkan pendidikan di SD Negeri Pagandongan pada tahun 2009. Pada tahun ini juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Makassar dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Makassar pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Bosowa Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis pernah mengikuti beberapa organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sospol Universitas Bosowa Makassar menjabat sebagai Koordinator Minat dan Bakat dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAN) Universitas Bosowa Makassar menjabat sebagai Koordinator Pendidikan dan Kemahasiswaan. Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2019.